

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk menilai suksesnya suatu perusahaan dapat di ukur dengan berapa besar jumlah laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Informasi laba dapat digunakan pihak internal dan eksternal untuk kepentingan dalam pengambilan keputusan dan keberlangsungan operasional perusahaan termasuk besaran pajak. Maka kualitas informasi laba yang disajikan perusahaan secara langsung dapat menarik perhatian dari kalangan investor, kreditor, para pembuat kebijakan akuntansi, maupun Direktorat Jendral Pajak. Informasi laba juga dapat membantu *stakeholders* dan investor dalam mengestimasi *earnings power* (kekuatan laba) untuk menaksir resiko dalam investasi dan kredit serta dapat mengukur seberapa besar kemampuan kinerja pihak manajemen dalam pencapaian laba tersebut. Untuk menghindari terjadinya perilaku menyimpang dalam menyajikan dan melaporkan informasi laba tersebut yang dikenal dengan praktik manajemen laba.

Pihak manajemen sebagai pengelola perusahaan tentu ingin memperoleh laba yang tinggi, akan berpengaruh pada bonus yang akan diperoleh pihak manajemen. Semakin tinggi laba yang diperoleh maka akan semakin tinggi bonus yang akan diterima. Manajemen laba merupakan upaya untuk mengubah, menyembunyikan, dan merekayasa angka-angka dalam laporan keuangan dan mempermainkan metode dan prosedur akuntansi yang digunakan perusahaan (Sulistyanto, 2008).

Manajemen laba dapat dilakukan melalui praktik perataan laba (*income smoothing*), *taking a bath*, dan *income maximization* (Scoot, 2000). Laporan keuangan tidak lagi menjadi kredibel dan mempunyai nilai fundamental pada perusahaan, karena perusahaan mempercantik informasi keuangan dengan praktek manajemen laba.

Perekayasaan laporan keuangan telah menjadi isu sentral sebagai sumber penyalahgunaan informasi yang dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan. Sehingga informasi yang disampaikan terkadang tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Kondisi ini dikenal sebagai asimetri informasi (*information asymmetric*) yaitu kondisi dimana ada ketidakseimbangan perolehan informasi antara pihak manajemen sebagai penyedia informasi dengan pemegang saham dan *stakeholders* (Hairu, 2009:1).

Manajemen menginginkan pembayaran pajak yang seminim mungkin, maka melakukan upaya perencanaan pajak yaitu, menekan beban pajak secara eufimisme (Suandy, 2014 : 1). Perencanaan pajak lebih condong terhadap strategi untuk menekan beban pajak sekecil mungkin tetapi dengan tidak melanggar konstitusi atau Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Menurut Gunawan, yang dikutip oleh Lumbantoruan (Lumbantoruan : 1996:485), *tax planning* merupakan upaya legal yang bisa dilakukan oleh wajib pajak. Tindakan itu legal karena penghematan pajak hanya dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur (*loopholes*).

Adanya perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal dapat menimbulkan kesulitan dalam penentuan besarnya laba, sehingga bisa

mempengaruhi posisi laporan keuangan dan menyebabkan tidak seimbangnya saldo akhir. Oleh karena itu, perlu penyesuaian saldo antara laba akuntansi dengan laba fiskal melalui rekonsiliasi fiskal. Perbedaan temporer antara laba akuntansi dan laba fiskal menimbulkan beban pajak tangguhan (Yulianti, 2009).

Laporan keuangan dibuat bertujuan untuk menyediakan informasi yang dapat berguna dalam pengambilan keputusan. Salah satu hal yang penting dalam laporan keuangan yang dijadikan sebagai alat untuk menginformasikan kinerja suatu perusahaan adalah laba. Masalah terjadi ketika terjadi perbedaan laba dan nilai buku sebagai alat pengukur kinerja perusahaan dihadapkan dengan praktik manajemen laba (*earnings management*) yang dilakukan oleh manajer (Kusuma, 2006).

Informasi laba yang terdapat di laporan keuangan merupakan hal penting, terlebih lagi bagi pihak yang menggunakan laporan keuangan untuk tujuan kontrak dan pengambilan keputusan investasi. Sugianto dan Siagian (2007) dalam Husnul Khotimah (2014) menyatakan bahwa Informasi laba harusnya menggambarkan keuangan perusahaan dan keadaan ekonomi perusahaan yang sebenarnya, namun kenyataannya malah sering kali pihak manajemen justru memanipulasi laporan keuangan dengan menaikkan laba untuk lebih mempercantik laporan keuangan demi memaksimalkan kepuasan mereka (Sugianto dan Siagian, 2007 dalam Husnul Khotimah, 2014).

Adanya keinginan dari pihak manajemen untuk membuat beban pajak yang sekecil mungkin, agar pihak manajemen dapat meminimalkan

pembayaran pajak. Perencanaan pajak didefinisikan suatu proses pembauran usaha-usaha wajib pajak atau sekelompok wajib pajak untuk menggunakan fasilitas perpajakan yg digunakan untuk meminimalkan beban atau kewajiban pajaknya, baik yang berupa pajak penghasilan maupun pajak lainnya, dengan cara memanfaatkan fasilitas perpajakan, penghematan pajak, dan penghindaran pajak yang sesuai dengan dan tidak menyimpang dari ketentuan perundang-undangan perpajakan (Harnanto, 2013).

Beban pajak tangguhan adalah jumlah pajak terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kerugian yang belum dikompensasi (Harnanto, 2013).Beda temporer adalah perbedaan yang disebabkan adanya perbedaan waktu dan metode pengakuan penghasilan dan beban tertentu berdasarkan standar akuntansi dengan peraturan perpajakan (Suandy, 2008). Mana terjadi koreksi negatif, yaitu nilai penghasilan berdasarkan akuntansi lebih tinggi dari nilai penghasilan berdasarkan pajak, serta nilai biaya berdasarkan akuntansi lebih kecil dari nilai biaya berdasarkan pajak (Suandy, 2008).

Penelitian Ratna Eka Puji Astutik (2016) pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2012-2014 perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang bergerak dalam bidang makanan dan minuman yang mengindikasikan model penelitian layak dilanjutkan pada analisa berikutnya. Hubungan antara model yang digunakan

dalam penelitian tersebut terhadap manajemen laba memiliki hubungan yang erat.

Peneliti tertarik untuk melakukan Penelitian dengan judul “**Pengaruh Perencanaan Pajak Dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan *Property* dan *Real Estate* Yang Terdaftar Di Bei Periode 2017-2019)**”.

1.2 Rumusan Masalah

- 1) Apakah perencanaan pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba?
- 2) Apakah beban pajak tangguhan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba?
- 3) Apakah perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan berpengaruh signifikan secara simultan terhadap manajemen laba?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui apakah perencanaan pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.
- 2) Untuk mengetahui apakah beban pajak tangguhan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.
- 3) Untuk mengetahui apakah perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan berpengaruh signifikan secara simultan terhadap manajemen laba.

1.4 Manfaat Penelitian

Didalam pengertian suatu penelitian mengandung dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan juga manfaat praktis :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memperluas literatur tentang pengembangan ilmu pengetahuan mengenai pengaruh perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba.

2. Manfaat Praktis

Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada manajemen dalam meningkatkan persepsi positif kepada pengguna laporan keuangan terhadap kualitas laba akuntansi yang dilaporkan melalui pengelolaan perbedaan temporer dan perencanaan pajak.

1.5 Pembatasan Masalah dan Originalitas

1.5.1 Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis membatasi ruang lingkup penelitian agar tidak terlalu memperluas permasalahan, sehingga penelitian yang dilakukan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan. Penelitian ini hanya terbatas pada informasi laporan keuangan pengaruh perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba (Studi empiris pada perusahaan *property dan real estate* yang terdaftar diBEI periode 2017-2019).

1.5.2 Originalitas

Penelitian ini merupakan replikasi penelitian yang dilakukan Sules Jayanti, M. Sodik dan Hartini P. P dengan judul “Pengaruh Perencanaan Pajak dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba (Studi

Empiris Pada Perusahaan *Property dan Real Estate* yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2018)”.
Tahun 2014-2018)”).

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian skripsi ini, penulis membaginya dalam lima bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Barisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan originalitas serta sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang teori yang digunakan sebagai dasar penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dan penelitian yang relevan, kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang objek penelitian, jenis penelitain, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, tehnik pengumpulan data, definisi operasional, variabel penelitian, teknik analisis data dan jadwal penelitian.

BAB IV : HASIL dan PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian yang diperoleh beserta pembahasannya sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibuat sebelumnya.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran sesuai dengan hasil penelitian yang diperoleh.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

a. Teori keagenan (*agency theory*)

Dasar manajemen laba berawal dari pendekatan teori *agency*, menurut pendapat Jensen dan Meckling hubungan kepentingan manajemen sebagai agen dengan investor sebagai *principal*, menimbulkan konflik dalam pelaporan kualitas laba. Konflik kepentingan yakni, agen mempunyai kewajiban pengelolaan emiten seperti yang dipercayakan *principal*, sedangkan *principal* sebagai penyedia dana serta fasilitas untuk operasional emiten (Sulistyanto, 2008 : 96).

Pada teori ini mengasumsikan setiap individu hanya termotivasi atas kesejahteraan serta kepentingannya sendiri. Agen termotivasi atas kesejahteraan dari tingginya kompensasi, *principal* termotivasi atas kesejahteraan dari pembagian deviden serta naiknya harga saham emiten. Konflik terus menguat saat *principal* mendapatkan informasi yang minim atas kinerja agen terhadap emiten dan agen, akibatnya terjadi asimetri informasi atas laba sehingga terdorong keinginan agen menyembunyikan informasi pelaporan keuangan dengan praktek manajemen laba (Aditama, *et al.*, 2014).

Konflik tersebut menimbulkan biaya keagenan, biaya tersebut dapat diminimumkan melalui mekanisasi pengawasan dengan menyejajarkan kepentingan tersebut. *Principal* mengomando agar agen tidak *over* dalam pemegangan kas, sebab kas merupakan salah satu pemicu agen berbuat kecurangan (Herdawati, 2015).

b. Teori Akuntansi Positif (Positive accounting theory)

Teori ini berusaha membuat ramalan yang baik sesuai kondisi, ramalan tersebut berkaitan dengan tindakan dan respon manajer pada pemilihan metode akuntansi serta standar akuntansi yang baru (Schoor, 2006). Menurut pandangan Watt, teori akuntansi positif bertujuan memaparkan serta meramal akibat atau efek dari keputusan yang di ambil manajer kepada pihak yang berkepentingan (Watt, *et al.*, 1990).

Anis dan Iman berpendapat, teori akuntansi positif adalah bagian dari teori keagenan, sebab teori akuntansi positif mengakui hubungan manajer dengan pihak berkepentingan (Aditama, *et al.*, 2014).

Menurut Watt serta Zimmerman teori akuntansi positif berkaitan dengan perilaku kesempatan manajer dan menghasilkan hipotesis, yakni (Schoor, 2000):

1) *Bonus Plan Hypothesis*

Pilihan manajer dalam metode akuntansi dengan tujuan memperoleh bonus yang tinggi berdasar laba, maka akan memilih metode peningkatan pelaporan laba.

2) *Debt Covenant Hypothesis*

Pilihan manajer dalam metode akuntansi dengan tujuan menghindari perjanjian hutang atau menunda pembayaran hutang tanpa dikenakan sanksi, maka akan memilih metode peningkatan pelaporan pendapatan atau laba.

3) *The Political Cost Hypothesis*

Pilihan manajer dalam metode akuntansi dengan tujuan meminimumkan atau mengefisienkan beban pajak yang ditanggung perusahaan, maka akan memilih metode menurunkan pelaporan laba.

2.2 Manajemen laba

Menurut Belkoui dalam Achmad Daengs (2014:201) pengertian manajemen laba yaitu: “*Earnings management adalah suatu kemampuan untuk memanipulasi pilihan-pilihan yang tersedia dan mengambil pilihan yang tepat untuk dapat mencapai tingkat laba yang diharapkan. Hal ini adalah salah satu contoh yang mencolok dari akuntansi yang dirancang*”. Menurut Ilham Fahmi (2013:279) manajemen laba didefinisikan sebagai berikut: “*Earnings management (manajemen laba) adalah suatu tindakan yang mengatur laba sesuai dengan yang dikehendaki oleh pihak tertentu atauterutama oleh manajemen perusahaan (company management). Tindakan earnings management sebenarnya didasarkan oleh berbagai tujuan danmaksud-maksud yang terkandung didalamnya*”.

Praktek manajemen laba dapat dipandang dua perspektif yang berbeda yaitu sebagai tindakan yang salah (negatif) dan tindakan yang seharusnya dilakukan manajemen (positif). Manajemen laba dikatakan (negatif) jika dilihat sebagai perilaku oportunistik manajer untuk memaksimalkan utilitasnya dalam menghadapi kontrak kompensasi, kontrak utang, dan *political cost*, sedangkan manajemen laba disebut (positif) jika dilihat dari perspektif *efficient earnings management* dimana manajemen laba memberikan manajer suatu fleksibilitas untuk melindungi diri mereka dan perusahaan dalam mengantisipasi kejadian-

kejadian yang tidak terduga untuk kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak.

Manajemen beralasan menerapkan praktek manajemen laba untuk mendongkrak kepercayaan investor kepada perusahaan. Laba berkaitan dengan prestasi yang dicapai perusahaan, sehingga manajemen akan memperoleh bonus senilai peningkatan laba. Hingga sekarang praktek manajemen laba masih kontroversi pada laporan keuangan, padahal tidak semua praktek manajemen laba berkonotasi negatif yakni, manipulasi data.

Pengukuran manajemen laba menggunakan pendekatan distribusi laba. Probabilitas perusahaan dalam melakukan manajemen laba untuk menghindari kerugian diperoleh dari pendistribusian manajemen laba berdasarkan *scaled earnings changes/ ΔE* (perubahan laba) (Burgstahler dkk. 2002; Philips dkk. 2003; Yulianti: 2005). Bila nilai ΔE adalah nol atau positif, maka perusahaan menghindari penurunan laba. Bila nilai ΔE adalah negatif, maka perusahaan menghindari pelaporan kerugian. Menyatakan bahwa para manajer melakukan manajemen laba dengan pendekatan distribusi laba dikarenakan manajer sadar bahwa pihak eksternal, khususnya para investor, bank dan supplier menggunakan batas pelaporan laba dalam menilai kinerja manajer (Sules Jayanti, M. Sodik dan Hartini P. P. 2020). Dapat dihitung dengan rumus:

$$\Delta E = \frac{E_{it} - E_{it-1}}{MVE_{t-1}}$$

Keterangan :

ΔE = perubahan laba

E_{it} = Laba perusahaan tahun t

E_{it-1} = Laba perusahaan i tahun t-1

MVE_{t-1} = Market value of equity

2.3 Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Perencanaan pajak didefinisikan sebagai proses pengintegrasian wajib pajak atau sekelompok wajib pajak untuk mengurangi beban atau kewajiban pajaknya, baik yang berupa pajak penghasilan maupun pajak-pajak yang lain, dengan cara memanfaatkan fasilitas perpajakan, penghematan pajak, dan penghindaran pajak yang sesuai dengan atau tidak menyimpang dari ketentuan perundang-undangan perpajakan. (Harnanto, 2013).

Dalam *tax planning* ada 3 macam cara yang dapat dilakukan wajib pajak untuk menekan jumlah pajaknya yaitu :

- a. *Tax avoidance* (penghindaran pajak) adalah strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan.
- b. *Tax evasion* (penyelundupan pajak) adalah strategi dan teknik penghindaran yang dilakukan secara ilegal dan tidak aman bagi wajib pajak, dan cara penyelundupan ini bertentangan dengan ketentuan perpajakan, karena metode

dan teknik yang digunakan tidak berada dalam koridor undang-undang dan peraturan perpajakan.

- c. *Tax saving* (penghematan pajak) adalah suatu tindakan dalam penghematan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak secara legal dan aman bagi wajib pajak karena sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. (Pohan, 2013).

Tax planning atau perencanaan pajak yang baik mensyaratkan beberapa hal yaitu sebagai berikut :

- a. Tidak melanggar ketentuan perpajakan

Jadi rekayasa perpajakan yang didesain dan implementasikan bukan merupakan *tax evasion*.

- b. Secara bisnis masuk akal (*reasonable*)

Kewajaran dalam melakukan transaksi bisnis harus berpegang kepada praktik perdagangan yang sehat dengan menggunakan harga pasar yang wajar, yakni tingkat harga antara pembeli dan penjual yang independen, bebas melakukan transaksi.

- c. Di dukung oleh bukti-bukti pendukung yang memadai

Kebenaran formal dan materiil suatu transaksi keuangan perusahaan dapat dibuktikan dengan adanya kontrak perjanjian dengan pihak ketiga dari pelanggan, bukti penyerahan barang atau jasa, faktur pajak sebagai bukti penagihannya serta pembukuannya. (Pohan, 2013).

2.3.1 Motivasi Perencanaan Pajak

Motivasi yang mendasari dilakukannya suatu perencanaan pajak yang dapat terjadi adanya upaya meminimalkan kewajiban pembayaran pajak (diolah

dari TNSrinivasan, "Tax Evasion: A Model", dalam *Journal of Publik Economics*, 1973:339-346) dalam Pohan (2014: 18) sebagai berikut:

1. Tingkat kerumitan suatu peraturan (*Complexity of rule*)

Makin rumit peraturan perpajakan, muncul kecenderungan wajib pajak untuk menghindarinya karena biaya untuk mematuhi (*compliance cost*) menjadi tinggi.

2. Besarnya pajak yang dibayar (*Tax required to pay*)

Makin besar jumlah pajak yang harus dibayar, akan makin besar pula kecenderungan wajib pajak untuk melakukan kecurangan dengan cara memperkecil jumlah pembayaran pajaknya.

3. Risiko deteksi (*Probability of detection*)

Risiko deteksi ini berhubungan dengan dengan tingkat probabilitas apakah pelanggaran ketentuan perpajakan ini akan terdeteksi atau tidak. Makin rendah risiko terdeteksi, wajib pajak cenderung untuk melakukan pelanggaran. Sebaliknya, bila suatu pelanggaran mudah diketahui, wajibpajak akan memilih posisi konservatif dengan tidak melanggar aturan.

4. Besarnya denda (*Size of pinalty*)

Makin besar sanksi perpajakan yang bisa dikenakan, maka wajib pajak cenderung mengambil posisi konservatif dengan tidak melanggar ketentuan perpajakan. Sebaliknya makin ringan sanksi atau bahkan ketiadaan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan wajib pajak, maka kecenderungan untuk melanggar akan lebih besar.

5. Moral Masyarakat

Moral masyarakat akan memberi warna tersendiri dalam menentukan kepatuhan dan kesadaran mereka dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.

Secara umum motivasi dilakukannya perencanaan pajak yaitu untuk memaksimalkan laba setelah pajak karena pajak ikut mempengaruhi pengambilan keputusan atau suatu tindakan dalam operasi perusahaan untuk melakukan investasi melalui analisis yang cermat dan pemanfaatan peluang atau kesempatan yang ada dalam ketentuan peraturan yang sengaja dibuat oleh pemerintah untuk memberikan perlakuan yang berbeda atas objek yang secara ekonomi hakikatnya sama dengan memanfaatkan:

- 1) Perbedaan tarif pajak;
- 2) Perbedaan perlakuan atas objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak;
- 3) *Loopholes, shelters, dan havens.*

2.3.2 Tahap Perencanaan Pajak

Dalam Herdawati (2015) menyebutkan agar perencanaan pajak dapat berhasil sesuai harapan, maka rencana harus dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Menganalisis informasi yang ada, yakni dengan menganalisis komponen yang berbeda atas pajak yang terlibat dalam suatu proyek yang menghitung seakurat mungkin beban pajak yang harus ditanggung. Selain itu, juga harus memperhatikan faktor baik internal maupun eksternal yaitu berupa:
 - 1) fakta yang relevan;
 - 2) faktor pajak;

- 3) faktor non-pajak lainnya.
- b. Membuat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak
 - c. Mengevaluasi pelaksanaan rencana pajak, yakni untuk melihat sejauh manahasil pelaksanaan suatu perencanaan pajak terhadap beban pajak, perbedaan laba kotor dan pengeluaran selain pajak atas berbagai alternative perencanaan.
 - d. Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak, dengan demikian keputusan yang terbaik atas suatu perencanaan pajak harus sesuai dengan bentuk transaksi dan tujuan operasi.
 - e. Memutakhirkan rencana pajak, karena meskipun suatu rencana pajak telah dilaksanakan dan proyek juga telah berjalan, tetap perlu diperhitungkan setiap perubahan yang dapat berdampak terhadap komponen suatu perjanjian.

2.3.3. Aspek Perencanaan Pajak

Dalam buku perencanaan pajak (*tax planning*) dalam Herdawati (2015) sebagai langka peningkatan kepatuhan dan efisiensi pajak, dijelaskan beberapa alternatif untuk mengolah variable-variabel kritis tersebut, yakni melalui aspek-aspek:

- Proyeksi pajak, yakni perencanaan pajak dapat dilakukan melalui suatu proyeksi. Proyeksi pajak ini dapat berupa proyeksi arus kas, laba rugi, atau proyeksi atas rencana-rencana perusahaan.
- Bentuk usaha, yakni bentuk usaha juga berpengaruh pada pemajakan, bentuk usaha contohnya: PT, Koperasi, CV dengan modal yang terdiri dari saham, firma, persekutuan atau perorangan.

- Bidang usaha, yakni bidang usaha tertentu yang memperoleh perlakuan perpajakan yang berbeda, misalnya untuk perusahaan konstruksi dikenakan pajak penghasilan sebesar 2% dari penjualan dan bersifat final berdasarkan peraturan pemerintah No.140 tahun 2000 tentang PPh atas penghasilan dari usaha dari jasa konstruksi yang ditetapkan tanggal 21 desember 2000 dan keputusan menteri keuangan No.559/KMK.04/2000 yang mulai berlaku 26 desember 2000. Jika perusahaan memperoleh laba bersih yang cukup besar lebih dari 10%, maka pengenaan pajak penghasilan sebesar besar 2% ini menguntungkan.
- Pengawasan dan atau pemeriksaan pajak Direktorat jendral pajak akan melakukan pemeriksaan pajak dengan tujuan untuk:
 - 1) Menetapkan pajak-pajak negara terhutang.
 - 2) Menetapkan besarnya kerugian yang dapat dikompensasikan dengan saldo laba tahun berikutnya.
- Kebijakan Akuntansi
 1. Penilaian persediaan, yakni kebijakan akuntansi mengenai persediaan mensyaratkan menggunakan FIFO atau *Average Method*, sedangkan LIFO tidak diperkenankan dalam ketentuan perpajakan. Sesuai dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan terakhir disebut Undang- Undang No. 36 tahun 2008 selanjutnya dalam tulisan ini disebut Undang-Undang No. 36 tahun 2008 yaitu pasal 10 ayat 6 adalah “persediaan dan pemakaian persediaan

untuk perhitungan harga pokok dinilai dengan harga perolehan yang dilakukan secara rata-rata atau dengan cara mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama”.

2. Sewa guna usaha, yakni sewa guna usaha (*leasing*) aktiva tetap juga sangat menguntungkan dari segi beban pembayaran angsuran. Dari segi pemajakan, aktiva tetap sewa guna usaha tidak boleh disusutkan, tetapi beban angsuran lebih besar dari beban penyusutan, maka pembebanan pajaknya dapat menjadi lebih kecil.

Pohan (2013) menjelaskan bahwa perencanaan pajak (*tax planning*) adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan oleh perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimum. Dalam penelitian ini perencanaan pajak diukur dengan menggunakan rumus *tax retention rate* (tingkat retensi pajak), yang menganalisis suatu ukuran dari efektifitas manajemen pajak pada laporan keuangan perusahaan tahun berjalan (Wild, et al., 2005). Ukuran efektifitas manajemen pajak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ukuran efektifitas perencanaan pajak (Sules Jayanti, M. Sodik dan Hartini P. P. 2020). Dapat dihitung dengan rumus:

$$TRR = \frac{NetIncome_{it}}{PretaxIncome (EBIT)_{it}}$$

Keterangan :

TRR = Tax Retention Rate (tingkat retensi pajak)
perusahaan i pada tahun t

Net Income_{it} = Laba bersih perusahaan i pada tahun t.

Pretax Income (EBIT)_{it} = Laba sebelum pajak perusahaan i tahun t

2.4 Beban Pajak Tangguhan

Beban pajak tangguhan didefinisikan saldo akun pada neraca sebagai manfaat pajak yang jumlahnya merupakan estimasi yang akan dipulihkan dalam periode yang akan datang karena adanya perbedaan sementara antara standar akuntansi keuangan dengan peraturan perpajakan dan akibat adanya saldo kerugian yang dapat dikompensasi pada periode mendatang menurut PSAK No.46 IAI.

Menurut Zain (2007) Kewajiban pajak tangguhan maupun aset pajak tangguhan dapat terjadi dalam hal-hal sebagai berikut:

- a) Apabila penghasilan sebelum pajak lebih besar dari penghasilan kena pajak, maka beban pajak pun akan lebih besar dari pajak terutang, oleh karena itu akan menghasilkan kewajiban pajak tangguhan. Kewajiban pajak tangguhan dapat dinilai dengan mengalikan perbedaan temporer dengan tarif pajak yang berlaku.
- b) Apabila penghasilan sebelum pajak lebih kecil dari penghasilan kena pajak, maka beban pajak juga lebih kecil dari pajak terutang, oleh karena itu akan menghasilkan Aktiva Pajak Tangguhan. Aktiva pajak tangguhan merupakan

persamaan antara perbedaan temporer dengan tarif pajak pada saat perbedaan tersebut terpulihkan.

Beban pajak tangguhan adalah jumlah pajak terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kerugian yang belum dikompensasi (Harnanto, 2013). Beban pajak tangguhan diukur dengan menggunakan indikator membobotkan beban pajak tangguhan dengan total aset (Sules Jayanti, M. Sodik dan Hartini P. P. 2020). Dapat dihitung dengan rumus:

$$DTE = \frac{DeferredTaxExpense_{it}}{TotalAsset_{it-1}}$$

Keterangan :

DTE_{it} = Deferred Tax Expense (beban pajak tangguhan) perusahaan i pada tahun t

Total Asset $_{it-1}$ = Total aset perusahaan i pada tahun t-1

2.5 Hasil Penelitian yang relevan

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

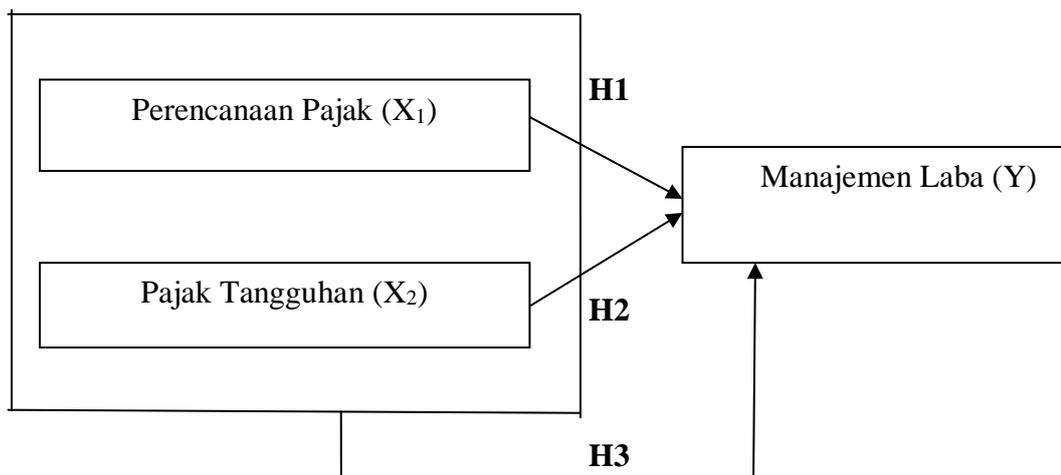
No	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Hasil Peneliti
1	Lutfi M Baradja, Yuswar Zainul Basri dan Vertari Sasmi (2017)	Pengaruh Beban Pajak Tangguhan, Perencanaan Pajak Dan Aktiva Pajak Tangguhan Terhadap	Secara parsial beban pajak tangguhan, perencanaan pajak dan aset pajak tangguhan berpengaruh positif

		Manajemen Laba pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015,	terhadap pengungkapan manajemen laba.
2	Sules Jayanti, M. Sodik dan Hartini P. P (2020)	Pengaruh Perencanaan Pajak dan Beban Pajak Tanggahan terhadap Manajemen Laba (Studi kasus pada Perusahaan <i>Property</i> dan <i>Real Estate</i> yang terdaftar di BEI tahun 2014–2018)	Perencanaan pajak memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap manajemen laba. Berbeda dengan beban pajak tanggahan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap manajemen laba.
3	Irsan Lubis dan Suryani (2018)	Pengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba sedangkan beban pajak tanggahan tidak	Tax planning dan ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen

		berpengaruh terhadap manajemen laba pada Perusahaan Manufaktur sektor industri barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016.	laba sedangkan beban pajak tanggungan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba pada Perusahaan Manufaktur sektor industri barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016.
--	--	---	---

2.6 Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran menjelaskan keterkaitan antara variabel yang akan diteliti. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini terlihat sebagai berikut :



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

2.7 Perumusan Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara dalam penelitian dan membutuhkan pembuktian lebih lanjut untuk membuktikan kebenaran hipotesis tersebut. Berdasarkan uraian kerangka pemikiran tersebut, hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah :

H1 = diduga perencanaan pajak secara parsial berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di BEI Periode 2017-2019.

H2 = diduga beban pajak tangguhan secara parsial berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di BEI Periode 2017-2019.

H3 = diduga perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan berpengaruh signifikan secara simultan terhadap manajemen laba pada perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di BEI Periode 2017-2019.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian yang digunakan adalah perusahaan *property dan real estate* yang terdaftar di BEI periode 2017-2019. Objek yang akan diteliti adalah Laporan keuangan perusahaan *property dan real estate* selama periode 2017-2019.

3.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian asosiatif kausal, yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk menganalisis dan mengungkapkan permasalahan yang bersifat memiliki hubungan sebab akibat antar dua variabel atau lebih. Penelitian ini memiliki variabel independen yaitu variabel yang mempengaruhi variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi (Sugiyono: 2010).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan yang dikaitkan dengan manajemen laba yang dilakukan perusahaan. Adapun rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yakni berkaitan dengan penelitian kuantitatif dan menggunakan data-datasekunder.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2016:80) mendefinisikan populasi sebagai berikut: *“Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan”*.

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi penelitian adalah seluruh perusahaan *Property dan Real Estate* yang menerbitkan laporan keuangan tahunan (*annually report*) yang diaudit dan dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode tahun 2017 sampai tahun 2019. Jumlah populasi penelitian ini sebanyak 62 perusahaan *property dan real estate* yang terdaftar di BEI periode 2017-2019.

3.3.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2016:81) mendefinisikan sampel sebagai berikut: *“Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pengukuran sampel merupakan suatu langkah untuk menentukan besarnya sampel yang diambil dalam melaksanakan penelitian suatu objek. Untuk menentukan besarnya sampel bisa dilakukan dengan statistik atau berdasarkan estimasi penelitian. Pengambilan sampel ini harus dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel yang benar-benar dapat berfungsi atau dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya, dengan istilah lain harus representatif mewakili”*.

Proses pemilihan sampel dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2016:85). Berdasarkan teknik *purposive sampling* maka terdapat 20 perusahaan yang menjadi sampel penelitian ini. Pertimbangan yang ditentukan dalam mengambil jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu:

1. Perusahaan *property dan real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2017-2019.
2. Perusahaan *property dan real estate* yang mengalami kerugian selama periode 2017 – 2019.
3. Perusahaan *property dan real estate* yang tidak melaporkan beban pajak tangguhan selama periode 2017 – 2019.
4. Perusahaan yang menggunakan mata uang asing dalam laporan keuangan.

Berikut proses pemilihan sampel berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan pada tabel 3.1 :

Tabel 3.1
Tahap Pemilihan Sampel

NO	Kriteria	Jumlah Perusahaan
1.	Perusahaan <i>property dan real estate</i> yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2017-2019.	62
2.	Perusahaan <i>property dan real estate</i> yang mengalami kerugian selama periode 2017 – 2019.	(12)
3.	Perusahaan <i>property dan real estate</i> yang tidak melaporkan beban pajak tangguhan selama periode 2017 – 2019.	(15)

4.	Perusahaan yang menggunakan mata uang asing dalam laporan keuangan.	(0)
Jumlah	Sampel Akhir	35
Tahun	Pengamatan	3
Jumlah	Pengamatan	105

Sumber : data yang diolah 2021

Berdasarkan kriteria-kriteria sampel yang telah ditentukan di atas, dari 62 perusahaan *property and real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2017-2019, diperoleh 35 perusahaan *property and real estate* yang masuk ke dalam kriteria-kriteria tersebut.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah pendekatan yang menggunakan data berbentuk angka pada analisis statistik. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa data laporan keuangan perusahaan *properti dan real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017- 2019. Data yang digunakan diambil dari laman www.idx.co.id tentang laporan keuangan.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam membuat penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah data sekunder berupa informasi laporan keuangan perusahaan *properti dan real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia melalui laman www.idx.co.id.

3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Konsep dasar dari definisi operasional mencakup pengertian untuk mendapatkan data yang akan dianalisis dengan tujuan untuk mengoperasionalkan

konsep-konsep penelitian menjadi variabel penelitian serta cara pengukurannya. Penelitian yang akan dilakukan ini menggunakan dua variabel yaitu variabel terikat (*dependent*) dan variabel bebas (*independent*) sebagai berikut.

a. Variabel Dependent (Y)

Dalam penelitian ini variabel dependen adalah manajemen laba. Manajemen laba merupakan tindakan manajer untuk mengolah laba dengan cara menaikkan atau menurunkan laba periode berjalan dari sebuah perusahaan yang dikelolanya tanpa menyebabkan kenaikan (penurunan) keuntungan ekonomi perusahaan jangka panjang (Sulistyanto, 2008).

Pengukuran manajemen laba menggunakan pendekatan distribusi laba. Probabilitas perusahaan dalam melakukan manajemen laba untuk menghindari kerugian diperoleh dari pendistribusian manajemen laba berdasarkan *scaled earnings changes/ΔE* (perubahan laba) (Burgstahler dkk. 2002; Philips dkk. 2003; Yulianti: 2005). Bila nilai ΔE adalah nol atau positif, maka perusahaan menghindari penurunan laba. Bila nilai ΔE adalah negatif, maka perusahaan menghindari pelaporan kerugian. Menyatakan bahwa para manajer melakukan manajemen laba dengan pendekatan distribusi laba dikarenakan manajer sadar bahwa pihak eksternal, khususnya para investor, bank dan supplier menggunakan batas pelaporan laba dalam menilai kinerja manajer (Sules Jayanti, M. Sodik, Hartini P.P 2020). Dapat dihitung dengan rumus:

$$\Delta E = \frac{E_{it} - E_{it-1}}{MVE_{t-1}}$$

Keterangan :

ΔE = perubahan laba

E_{it} = Laba perusahaan tahun t

E_{it-1} = Laba perusahaan i tahun t-1

MVE_{t-1} = Market value of equity

b. Variabel Independen (X)

Variabel independen dalam penelitian ini yaitu :

- perencanaan pajak (X_1)

Perencanaan pajak dapat dihitung dengan menggunakan rumus *tax retention rate* (tingkat retensi pajak), yang menganalisis suatu ukuran dari efektivitas manajemen pajak pada laporan keuangan perusahaan tahun berjalan. Ukuran efektivitas manajemen pajak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah efektivitas perencanaan pajak. Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan bagian manajemen pajak dan merupakan langkah awal dalam melakukan manajemen pajak. Perencanaan pajak merupakan proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau sekelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajak, baik PPh maupun beban pajak yang lainnya agar dibayar dengan seminimalnya Suandy (2008).

Perencanaan pajak didefinisikan sebagai proses pengintegrasian wajib pajak atau sekelompok wajib pajak untuk mengurangi beban atau kewajiban pajaknya, baik yang berupa pajak penghasilan maupun pajak-pajak yang lain,

dengan cara memanfaatkan fasilitas perpajakan, penghematan pajak, dan penghindaran pajak yang sesuai dengan atau tidak menyimpang dari ketentuan perundang-undangan perpajakan. (Harnanto, 2013). Dalam penelitian ini perencanaan pajak diukur dengan menggunakan rumus *tax retention rate* (tingkat retensi pajak), yang menganalisis suatu ukuran dari efektifitas manajemen pajak pada laporan keuangan perusahaan tahun berjalan (Wild, et al., 2005). Ukuran efektifitas manajemen pajak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ukuran efektifitas perencanaan pajak (Sules Jayanti, M. Sodik, Hartini P.P 2020).. Dapat dihitung dengan rumus:

$$TRR = \frac{NetIncome_{it}}{PretaxIncome (EBIT)_{it}}$$

Keterangan :

TRR = Tax Retention Rate (tingkat retensi pajak) perusahaan i pada tahun t

Net Income_{it} = Laba bersih perusahaan i pada tahun t.

Pretax Income (EBIT)_{it} = Laba sebelum pajak perusahaan i tahun t

- Beban pajak tangguhan (X₂)

Beban pajak tangguhan adalah jumlah pajak terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kerugian yang belum dikompensasi (Harnanto, 2013). Beban pajak tangguhan diukur dengan menggunakan indikator

membobotkan beban pajak tangguhan dengan total asset (Sules Jayanti, M. Sodik, Hartini P.P 2020). Dapat dihitung dengan rumus:

$$DTE = \frac{DefferedTaxExpense_{it}}{TotalAsset_{it-1}}$$

Keterangan :

DTE_{it} = Deferred Tax Expense (beban pajak tangguhan) perusahaan
i pada tahun t

Total Asset $_{it-1}$ = Total aset perusahaan i pada tahun t-1

3.7. Teknik Analisis Data

Analisis data ini menggunakan bantuan komputer dengan software program IBM SPSS statistic 24 for windows tanpa menggunakan perhitungan manual. Untuk penelitian ini, dilakukan uji sebagai berikut.

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis dengan melakukan analisis statistik deskriptif dan uji asumsi klasik. Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk mengetahui dispersi dan distribusi data. Sedangkan uji asumsi klasik dilakukan untuk menguji kelayakan model regresi yang selanjutnya akan digunakan untuk menguji hipotesis penelitian.

3.7.1 Analisis Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui karakteristik sampel yang digunakan dan variabel penelitian. Analisis statistik deskriptif ini meliputi jumlah, tendensi sentral (rata-rata, median dan modus), nilai maksimum, nilai minimum dan standar deviasi.

3.7.2 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data yang akan digunakan dalam model regresi berdistribusi normal. Analisis yang digunakan untuk menguji normalitas dalam penelitian ini yaitu dengan uji *kolmogrof-smiernov test* dengan ketentuan jika nilai signifikan *kolmogrof-smiernov test* pada variabel lebih besar dari nilai signifikansi ($\alpha > 0,05$) yang telah ditetapkan maka data berdistribusi normal. Sebaliknya jika nilai signifikansi *kolmogrof-smiernov test* pada variabel lebih kecil dari nilai signifikansi yang telah ditetapkan ($\alpha < 0,05$) maka tidak berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terdapat ketidaksamaan variance residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Salah satu cara yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya gejala heteroskedastisitas adalah dengan melihat pada grafik *scatter plot*.

3.8 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan variabel dependen adalah Manajemen Labadan variabel

independen adalah Perencanaan Pajak dan Aset Pajak Tangguhan. Model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 (X_1) + \beta_2 (X_2) + e$$

Keterangan:

Y = Variabel Manajemen Laba

α = Konstanta

β_1 = Koefisien regresi variabel independen Perencanaan pajak

β_2 = Koefisien regresi variabel independen Aset Pajak Tangguhan

X1 = Variabel Perencanaan pajak

X2 = Variabel Aset Pajak Tangguhan

E = Error Term

3.9 Uji Koefisien Determinasi (Uji R^2)

Uji Koefisien Determinasi (R^2) adalah persamaan statistik yang digunakan untuk mengetahui ketepatan hubungan satu variabel atau lebih terhadap variabel dependennya dalam satu persamaan regresi linier berganda. Koefisien determinasi dihitung dengan mengkuadratkan koefisien korelasi (R^2). Dalam aplikasi SPSS angka yang digunakan untuk melihat koefisien determinasi yaitu angka R^2 adjusted, dikarenakan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini lebih dari dua variabel.

3.10 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dengan menggunakan output SPSS statistic 24. Analisis terhadap variabel dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

3.10.1 Uji Signifikan Secara Individu (Uji T)

Tujuan dilakukan pengujian ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh variabel bebas (independen) secara individual terhadap variabel terikat (dependen). Dengan tingkat signifikan 0,05 maka dapat ditentukan H_0 diterima atau H_0 ditolak.

Jika hasil penelitian menunjukkan $t_{hitung} < t_{tabel}$ pada taraf signifikan 0,05 maka H_0 diterima dan H_a ditolak, sedangkan jika hasil penelitian menunjukkan $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ pada taraf signifikan 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima (Riduwan:2013).

3.10.2 Uji Signifikan Secara Simultan (Uji F)

Uji F adalah uji kelayakan model (*goodness of fit*) yang digunakan untuk menguji apakah regresi yang kita buat atau signifikan atau tidak baik atau non signifikan. Jika model signifikan maka model bisa digunakan untuk prediksi atau peramalan, sebaliknya jika non atau tidak signifikan maka model regresi tidak bisa digunakan untuk peramalan.

Jika hasil penelitian menunjukkan $F_{hitung} < F_{tabel}$ pada taraf signifikan 0,05 maka H_0 diterima dan H_a ditolak, sedangkan jika hasil penelitian menunjukkan $F_{hitung} \geq F_{tabel}$ pada taraf signifikan 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima (Riduwan:2013).